

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor modal manusia. *Schultz* (1961) dan *Becker* (1964) mendefinisikan sumber pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan yang diperoleh individu dari waktu ke waktu, melalui pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, perawatan medis, dan migrasi adalah modal manusia. Dengan demikian, sumber daya manusia dapat dibagi menjadi tiga komponen utama: kesehatan, pendidikan, dan pengalaman / pelatihan. Ogundari dan Awokuse (2018) menjelaskan bahwa adanya pengaruh produktivitas tenaga kerja yang bersifat positif dari investasi modal manusia yang menimbulkan masalah dalam menerapkan kebijakan pembangunan di Negara Afrika. Meskipun demikian, konsep *human capital* itu kompleks dan multidimensi karena status kesehatan dan pendidikan telah menjadi ukuran modal manusia yang lebih umum digunakan dalam studi empiris sebelumnya tentang hubungan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Teori *human capital* sebenarnya bukanlah sebuah konsep baru dalam teori ekonomi. Konsep mengenai modal manusia sudah ada di jaman Adam Smith (1776), dan dikembangkan oleh para ilmuwa lainnya pada abad ke 19 yang membahas pentingnya investasi keterampilan manusia. Selain itu beberapa penelitian tentang *human capital* sudah banyak dilakukan dengan metode dan hasil yang berbeda-beda.

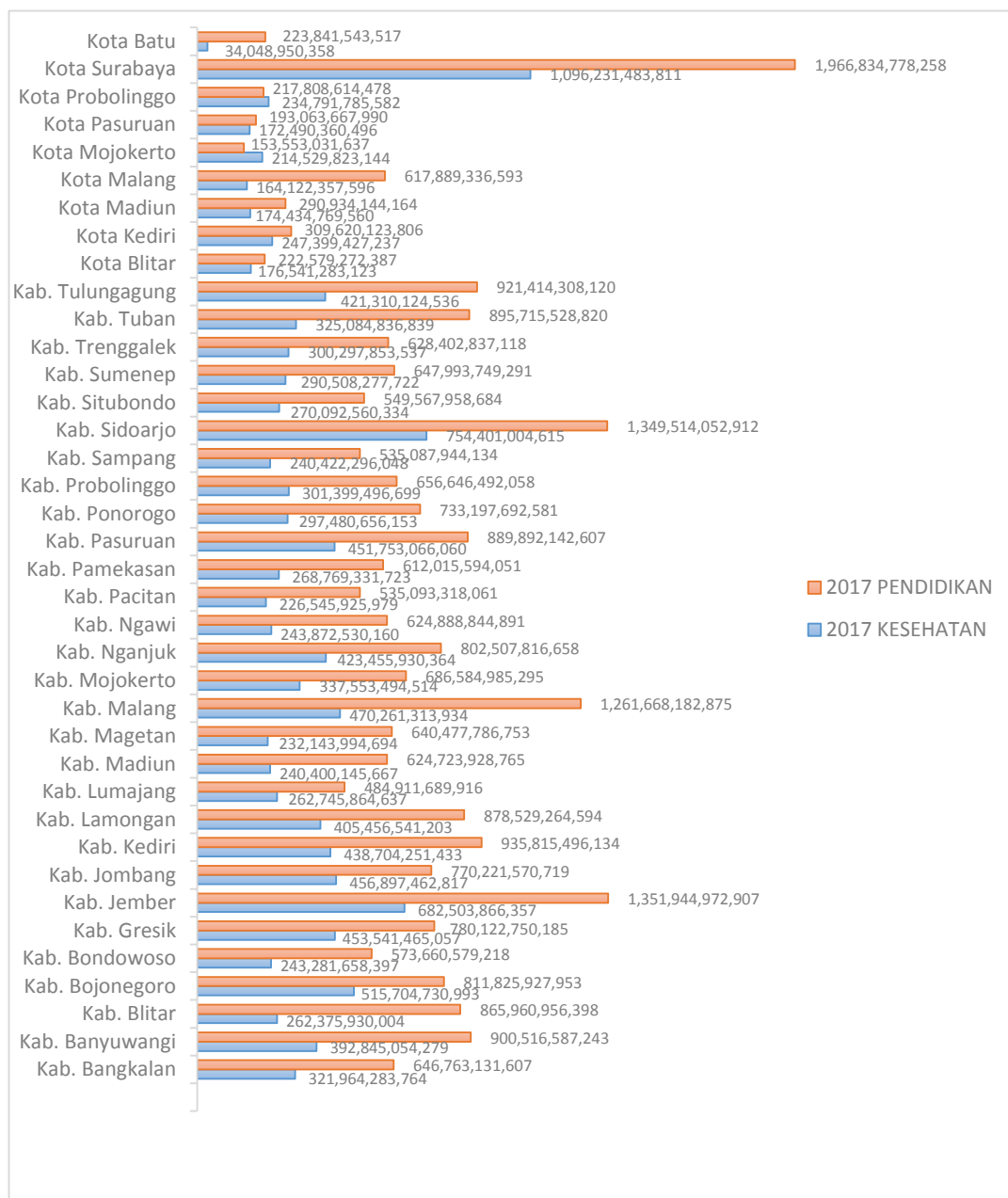
Tidak hanya modal fisik, terdapat pula modal manusia yang mempunyai peran penting untuk pembangunan ekonomi. Modal manusia lebih memiliki efek jangka panjang dan berkelanjutan (Anwar, 2017). Modal manusia yang berkelanjutan diharapkan menjadi faktor dalam pembangunan yang berkelanjutan. (de La Fuente dalam Alfa dan Erlinda, 2014), menjelaskan hubungan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah pengetahuan dan keterampilan pada manusia bisa meningkatkan produktivitas dalam meningkatkan perekonomian dengan menciptakan teknologi baru. Ogundari dan Awkojuse (2018) mengatakan

bahwa tenaga kerja yang lebih berpendidikan dan lebih sehat lebih cenderung untuk menciptakan dan mengadopsi teknologi baru.

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas modal manusia. Menurut (Mayer, 2001) kesehatan yang lebih baik dapat menambah tingkat produktivitas dan upah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah hari yang hilang karena sakit. Sebaliknya, apabila tingkat kesehatannya buruk maka terjadi hilangnya jam kerja yang diakibatkan dengan penurunan kapasitas fisik dan mental pekerja, produktivitas dan upah keseluruhan. Dengan tingkat kesehatan yang baik maka terdapat peluang yang lebih besar untuk berinvestasi dalam pelatihan dan dalam perolehan keterampilan yang lebih baik di sektor pendidikan (Weil, 2007).

Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja yang terdidik dan sehat jasmani lebih mempunyai peluang menghasilkan output yang lebih besar. Pengembangan sumber daya manusia selanjutnya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia bahwa belanja publik untuk sektor pendidikan mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini dapat mengimplikasikan meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Kebijakan untuk pemberian subsidi pada pendidikan menyebabkan alokasi belanja pendidikan selalu terjadi peningkatan yang sangat besar pada periode tahun berikutnya. Berikut data perbandingan belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur:

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Gambar 1.1
Belanja Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur untuk
Bidang Pendidikan dan kesehatan (Rupiah), 2017

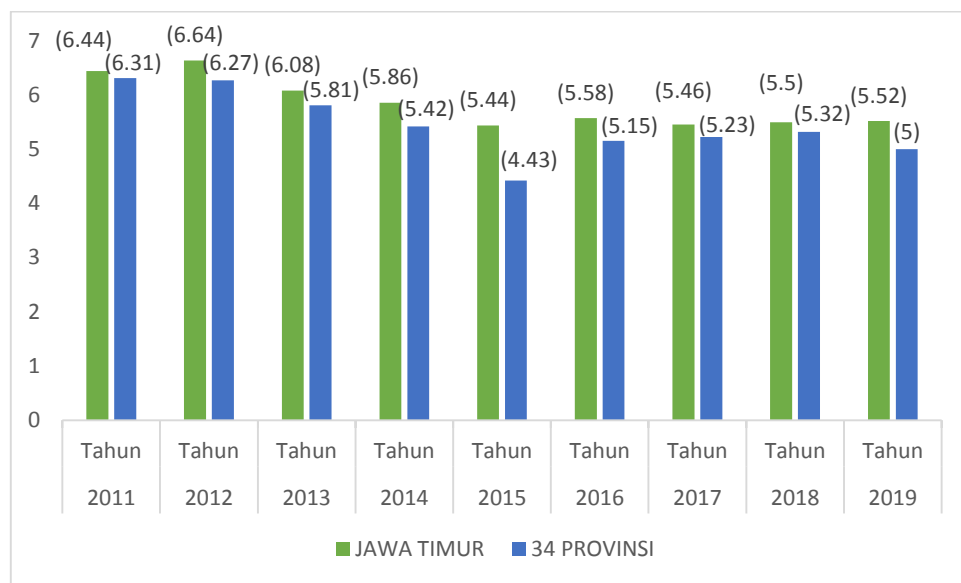
Sumber: Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020)

Menurut data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan bahwa di Jawa Timur tahun 2017 menunjukkan alokasi belanja pendidikan yang lebih banyak dibandingkan belanja di bidang kesehatan.

Pada tahun 2017 belanja untuk pendidikan yang tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp1.966.834 juta selanjutnya adalah Kabupaten Jember sebesar Rp1.351.944 juta. Untuk anggaran belanja pendidikan terendah pada tahun 2017 adalah Rp153.553 juta. Untuk belanja kesehatan tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp1.096.231 juta, selanjutnya adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp754.401 juta. Sedangkan anggaran terendah adalah di Kota Batu sebesar Rp34.048 juta untuk alokasi belanja kesehatan.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi membuat pemerintahan daerah harus mengatur sendiri sumber-sumber pendapatan yang nantinya dialokasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Komposisi pendapatan daerah pada APBD terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. APBD terdiri atas Belanja Tidak Langsung (*Indirect Expenditure*) yaitu pengeluaran Pemerintah dengan manfaat selama setahun (terdiri dari Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional serta Pemeliharaan sarana Prasarana); Belanja Langsung (*Direct Expenditure*) terdiri atas 4 bagian, yaitu belanja pegawai, modal, barang dan jasa, serta belanja lainnya yang memiliki beberapa sub menurut fungsinya.

Pertumbuhan ekonomi di sebuah negara terlihat pada Produk Domestik Bruto. PDB menunjukkan hasil dari pendapatan dan pengeluaran total yang diperoleh dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, dimana tingkat PDB riil merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan PDB riil menunjukkan kemajuan perekonomian (Mankiw, 2012) atau menggunakan Produk Domestik Regional Bruto di tingkat daerah. PDRB dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu atas dasar harga berlaku dan dasar harga konstan. PDRB menurut harga konstan ialah hasil tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga berlaku pada satu tahun dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.



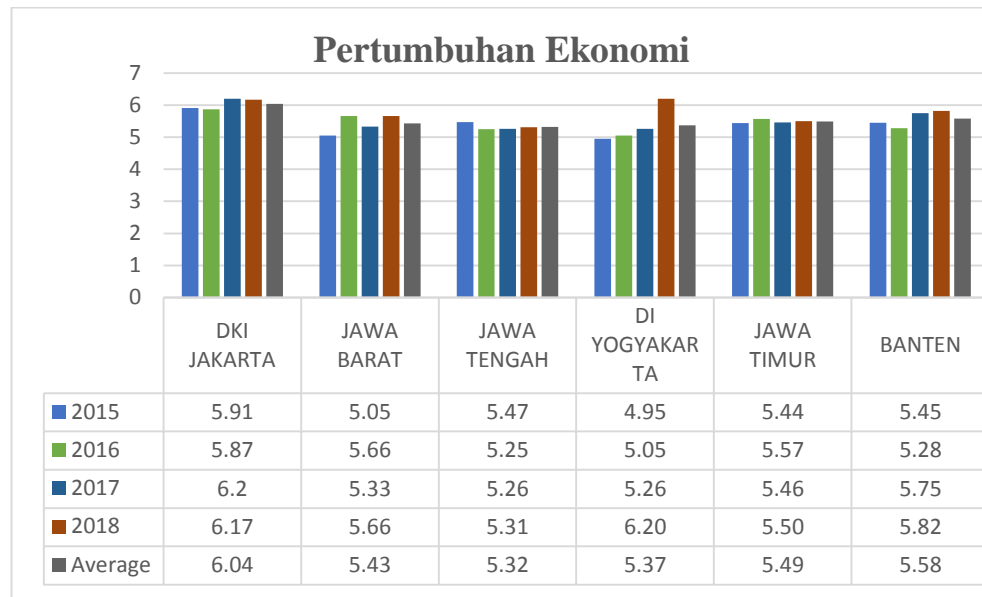
Gambar 1.2

Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut pengeluaran antara Provinsi Jawa Timur dan Nasional (persen), 2011-2019

Sumber: BPS Jawa Timur (2020)

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur dan di 34 provinsi lainnya dari tahun 2011-2019 menunjukkan pergerakan grafik yang *fluktuatif*. Pada tabel diatas juga diketahui bahwa ada hal menarik tentang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional di tahun 2011-2019. Peningkatan dan penurunan pertumbuhan di Jawa Timur sepanjang 5 tahun dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satunya, menurut teori Samuelson dan Nourdhous (1997) sumber pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja).

Grafik yang fluktuatif pada gambar 1.2 ternyata di tahun 2015-2019 pergerakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur cenderung lebih stabil. Dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan dengan 5 Provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, maka hanya berada di bawah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Berikut gambar Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa:

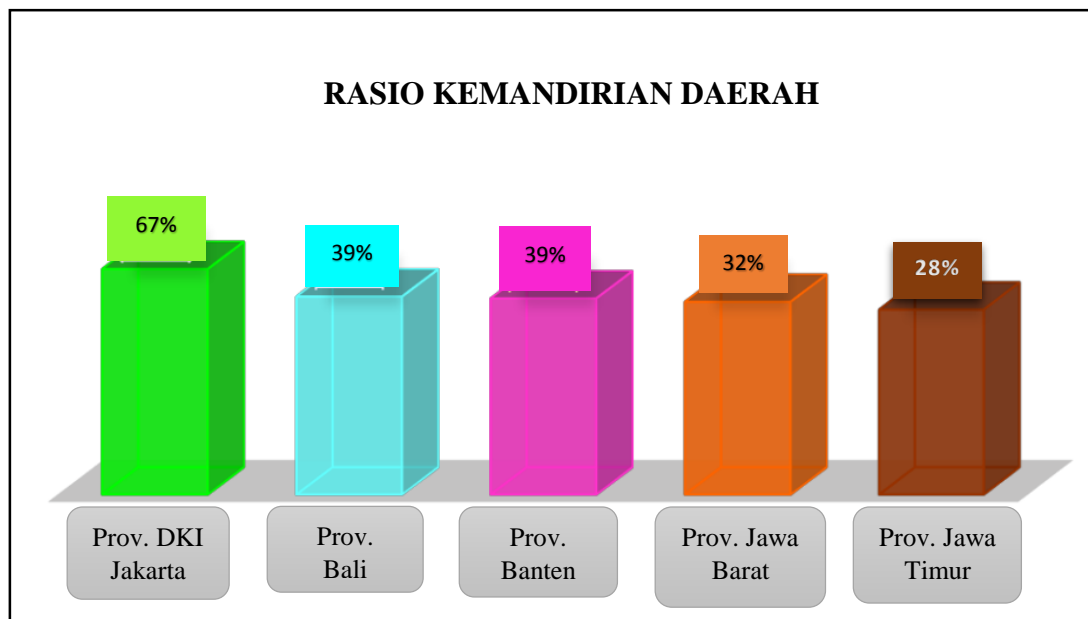


Gambar 1.3

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Pulau Jawa (persen), 2015-2018

Sumber: BPS Jawa Timur (2020)

Jawa Timur juga merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemandirian daerah yang cukup bagus yaitu berada pada posisi ke-5. Kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain menggambarkan tingkat kemampuan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahnya sendiri yang berasal dari perolehan pendapatan daerahnya sendiri. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio yang dihasilkan, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kegiatannya sendiri. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio yang dihasilkan, semakin kecil kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kegiatan daerahnya sendiri.

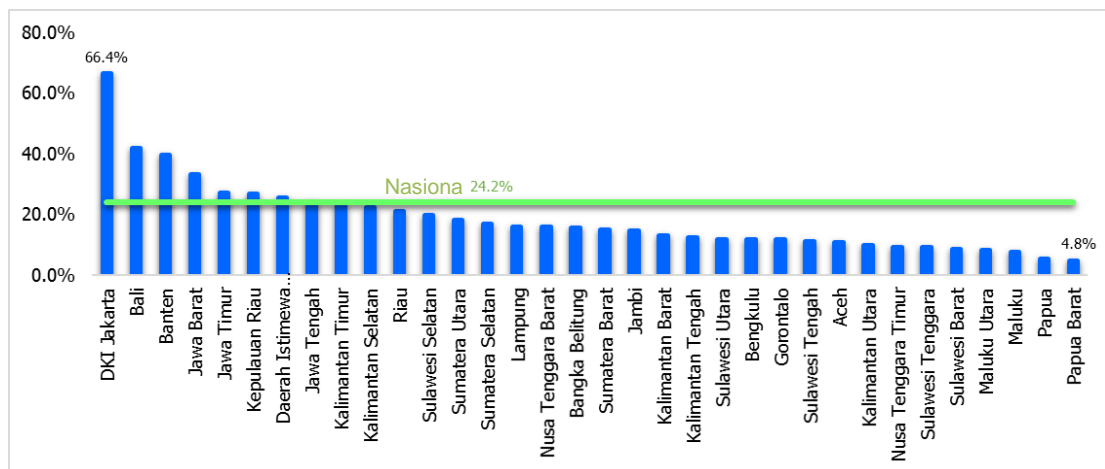


Gambar 1.4

Rasio Kemandirian Daerah Dalam Provinsi (persen), 2016

Sumber: Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020)

Rasio kemandirian daerah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota di dalam provinsi pada tahun 2016 yang memiliki tingkat kemandirian tertinggi adalah Jakarta. Tingkat kemandiriannya sebesar 67 persen. Jumlah penduduk yang besar mengakibatkan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak berkontribusi tinggi terhadap PAD Jakarta. Berikutnya, daerah objek wisata seperti Bali juga memiliki rasio kemandirian yang tinggi yaitu sebesar 39 persen. Tiga daerah berikutnya yang memiliki rasio kemandirian yang tinggi adalah Banten, Jawa Barat, dan Bangka Belitung yang memiliki rasio ketergantungan sebesar 39 persen, 32 persen dan 28 persen.



Gambar 1.5

Rasio Kemandirian Daerah Dalam Provinsi (persen), 2017

Sumber: Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020)

Pada rasio kemandirian daerah agregat se-provinsi, daerah yang rasionya tertinggi adalah DKI Jakarta dengan besaran rasio sebesar 66,4 persen, dan yang memiliki rasio terkecil adalah Papua Barat dengan besaran rasio 4,8 persen. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur tetap konsisten diatas 20% dan menempati posisi ke-5 bahkan diatas rata-rata nasional di tahun 2017. Peningkatan dan penurunan pertumbuhan di Jawa Timur sepanjang 5 tahun dipengaruhi oleh beberapa aspek. Menurut teori Samuelson dan Nourdhous (1997) sumber pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja).

Pertumbuhan Ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor Sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja dan bisa berdampak pada peningkatan produksi. Namun di sisi lain, menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi oleh kesempatan kerja. Tetapi jika diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki ketrampilan maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dari penjelasan tersebut, penulis akan menganalisis dampak yang ditimbulkan dengan adanya belanja yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 38 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan data tahun 2010-2018 yang

bersumber dari BPS dan Dirjen Perimbangan Keuangan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh studi yang berjudul: **“Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.”**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah “apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengestimasi dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

- a) Berdasarkan hasil estimasi, belanja Pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur.
- b) Hasil juga menunjukkan bahwa belanja di sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur.
- c) Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Materi yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah tinjauan pustaka, ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah hasil dan pembahasan dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.